



TAHUN 2025



BUPATI SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI NOMOR **647** TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):
- 8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- Presiden 19. Peraturan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek **Strategis** Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2021 Nomor 287):
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590):
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
- 35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

- Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
- 36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 2041 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3);
- 37. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
- 38. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8):
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
- 41. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 115);
- 42. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
- 43. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 167);
- 44. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 44 Tahun 2023 tentang

- Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 44);
- 45. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor
- 46. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN

BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025.

KESATU

: Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025, selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah dan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.

KEDUA

: Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam KESATU memuat tujuan, sasaran, Diktum kegiatan, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

KETIGA

: Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

KEEMPAT

: Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; f.
- g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Dinas Sosial;
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Ketahanan Pangan;
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian:
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;

- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Pendapatan Daerah;
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
- dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ff. Kecamatan Sinjai Utara;
- gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
- hh. Kecamatan Sinjai Barat;
- ii. Kecamatan Sinjai Timur;
- jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
- kk. Kecamatan Sinjai Borong;
- II. Kecamatan Bulupoddo;
- mm. Kecamatan Tellulimpoe;
- nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
- oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- pp. Rumah Sakit Umum Daerah.

KELIMA

Dokumen Renja Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEENAM

: Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum ke empat tercantum dalam Dokumen Renja masingmasing Perangkat Daerah.

KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 1 Aqusfus 2024

j. Bupati sinjai,

TR. FAHSUL FALAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 547TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SINJAI TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) yang selanjutnya disingkat dengan Renja PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Renja PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RKPD. Ruang lingkup Renja PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2025, sesuai dengan RKPD dimaksud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 adalah:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
- 21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 24. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
- 37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
- 38. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026, (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
- 39. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor ...);

- 40. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
- 41. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
- 42. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
- 43. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
- 44. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
- 45. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 44);
- 46. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 47);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH Tahun 2025 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2025 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026. Adapun tujuannya adalah untuk:

- 1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
- 2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 S/D
TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2025
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja
- 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB III RINCIAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Sekretariat Daerah:
- 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3. Inspektorat Daerah;
- 4. Dinas Pendidikan;
- 5. Dinas Kesehatan;
- 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 9. Dinas Sosial;
- 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 11. Dinas Ketahanan Pangan;
- 12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
- 15. Dinas Perhubungan;
- 16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- 17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
- 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 19. Dinas Pemuda dan Oahraga;
- 20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 22. Dinas Perikanan;
- 23. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- 24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- 26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 28. Badan Pendapatan Daerah;
- 29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
- 30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 32. Kecamatan Sinjai Utara;
- 33. Kecamatan Sinjai Selatan;
- 34. Kecamatan Sinjai Barat;
- 35. Kecamatan Sinjai Timur;
- 36. Kecamatan Sinjai Tengah;
- 37. Kecamatan Sinjai Borong;
- 38. Kecamatan Bulupoddo;
- 39. Kecamatan Tellulimpoe;
- 40. Kecamatan Pulau Sembilan:
- 41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- 42. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Sinjai Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2024.

Melalui penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

TR. FAHSUL FALAH

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas perkenaan dan karunia-Nya maka Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2025 telah disusun.

Sesuai dengan Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini melibatkan berbagai pihak olehnya itu ucapan terima kasih yang setinggi-setingginya tak lupa kami haturkan.

Semoga Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi kita semua, terutama bagi instansi terkait. Semoga Allah SWT meridhai segala langkahlangkah kita. Amin.

Sinjai,

Juli 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sinjat

Dr. Dr. O'CHADI SAMAD, M. Si Pangkat : Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	ΧV
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan	1 2 4 4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Re	enstra 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	42
3.3 Program dan Kegiatan	42
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	53
RAR IV DENI ITI ID	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2024 Kabupaten Sinjai
Tabel 2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai
Tabel 3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Tabel 4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Sinjai
Tabel 5.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 42
Tabel 6.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah, sesuai amanat tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai tahun 2025. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka waktu satu tahun ke depan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman kepada RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2025 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- j. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
 Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

- u. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323):
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- y. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655;
- z. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
- aa. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- bb. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
- gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
- hh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
- ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
- jj. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
- kk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- II. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
- mm. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- nn. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;
- oo. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
- pp. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);

- qq. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
- rr. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
- ss. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025)Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
- tt. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
- uu. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
- vv. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
- ww. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 19);
- xx. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 44);
- yy. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026;
- zz. Peraturan Bupati Sinjai Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 8);

1.3. Maksud dan Tujuan

Dengan adanya Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk menjabarkan RKPD Tahun 2025, terutama yang terkait dengan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD 2025 dan sebagai penuntun dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk jangka waktu satu tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahuntahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai, Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; Formulasi Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam bagian ini diuraikan mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangaan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.4 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2025 adalah 1). Meningkatkan Status kemajuan dan kemandirian Desa.

Untuk mencapai tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai adalah 1). Meningkatnya Status kemajuan dan kemandirian Desa; 3). Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua periode Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2024-2026 dan mendasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2023 yang telah dilaksanakan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah di raih atau dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024.

Secara umum realisasi capian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Realisasi capaian program/kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasi/keluaran yang direncanakan

Tabel 2.1
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI TERHADAP CAPAIAN RENSTRA
Program Penunjang Urusan P	emerintahan Daerah Kabupate	n/Kota
Kegiatan Pengadaan Barang I	Milik Daerah Penunjang Urusai	n Pemerintah Daerah
Persentase pemenuhan	Persentase pemenuhan	Pemenuhan kebutuhan
kebutuhan Barang Milik	kebutuhan Barang Milik	Barang Milik Perangkat
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah tercapai	Daerah terpenuhi dengan
	100% sesuai target 100%	baik
Sub Kegiatan Pengadaan Pera	latan dan Mesin Lainnya	

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dilakukan pergeseran anggaran	Tidak tercapainya target capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		·
Persentase LPM yang terlibat dalam pemberdayaan Masyarakat Miskin	Persentase LPM yang terlibat dalam pemberdayaan Masyarakat Miskin mencapai 100% sesuai target 50%	LPM yang terlibat dalam pemberdayaan Masyarakat Miskin sesuai tugas dan fungsinya
Pemberdayaan Masyarakat H Sama dalam Daerah Kabupate	Lembaga Adat Tingkat Da ukum Adat yang Masyarakat l en/Kota	erah Kabupaten/Kota serta Pelakunya Hukum Adat yang
Jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang diberdayakan	kemasyarakatan, lembaga	,
	Kapasitas Kelembagaan K, Posyandu, LPM dan Kara kat Hukum Adat	
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya mencapai 100% sesuai target 3 Lembaga	Lembaga kemasyarakatan dapat diberdayakan
	intah Desa dalam Pemanfaata	-
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Keterbatasan anggaran	Tidak tercapainya target capaian

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi program dan kegiatan serta sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas adalah dilakukan Perubahan renja jika Penganggaran tidak mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak.

Untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercapai tahun lalu akan ditindaklanjuti dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rencana kerja yang akan datang

- 2. Tidak terdapat program/kegiatan dan sub kegiatan yang melebihi target yang ditetapkan;
- 3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang sesuai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI TERHADAP CAPAIAN RENSTRA		
Program Penunjang Urusan P				
Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik dapat tercapai 100% sesuai target 100%	dengan aturan yang berlaku		
Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP dapat dicapai 100% sesuai target 100%	Temuan Berdasarkan LHP dapat diturunkan		
Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah tercapai 100% sesuai target 100%	Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah sesuai target		
Kegiatan Perencanaan, Penga	anggaran, dan Evaluasi Kinerja	Perangkat Daerah		
Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu mencapai 100% sesuai dengan target 100%	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu sesuai peraturan perundang- undangan		
Sub Kegiatan Penyusunan Do	kumen Perencanaan Perangka	at Daerah		
Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang mencapai 100% sesuai dengan target yaitu sebanyak 7 Dokumen	Dokumen perencanaan Perangkat Daerah dapat terselesaikan		

Kegiatan Administrasi Keuang	an Perangkat Daerah	
Persentase Penyusunan	Persentase Penyusunan	Dokumen Administrasi
Dokumen Administrasi	Dokumen Administrasi	Keuangan Perangkat
Keuangan Perangkat Daerah	Keuangan Perangkat	Daerah Tepat Waktu sesuai
Tepat Waktu	Daerah Tepat Waktu	dengan peraturan
	mencapai 100% sesuai dengan target 100%	perundang-undangan
Sub Kegiatan Penyediaan Gaj		
Jumlah Orang yang	Jumlah Orang yang	25 Orang ASN yang
menerima Gaji dan	menerima Gaji dan	menerima Gaji dan
Tunjangan ASN	Tunjangan ASN mencapai	Tunjangan ASN sesuai
	100% sesuai dengan target yaitu sebanyak 25 Orang	peraturan Perundang- undangan
Sub Kegiatan Koordinasi da		
Semesteran SKPD		
Jumlah laporan keuangan bulanan/	Jumlah Laporan keuangan	Laporan keuangan bulanan
bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	bulanan yang mencapai 100% sebanyak 12 Laporan	sebanyak 12 Laporan dan Laporan Semesteran SKPD
Laporan Koordinasi	dan Laporan Semesteran	sebanyak 1 Laporan dapat
Penyusunan Laporan	SKPD sebanyak 1 Laporan	terselesaikan
Keuangan Bulanan/		
Triwulanan / Semesteran SKPD		
Kegiatan Administrasi Kepega	waian Perangkat Daerah	
Rata-rata Nilai perilaku	Rata-rata Nilai perilaku	Rata-rata Nilai perilaku
perangkat daerah	perangkat daerah	perangkat daerah
berdasarkan kinerja ASN,	berdasarkan kinerja ASN,	berdasarkan kinerja ASN,
rata-rata capaian nilai SKP dan kinerja ASN	rata-rata capaian nilai SKP dan kinerja ASN mencapai	rata-rata capaian nilai SKP dan kinerja ASN sesuai
dan Kinerja ASN	100% sesuai dengan target	ketentuan yang berlaku
	100%	, ,
Sub Kegiatan Monitoring, Eval	uasi, dan Penilaian Kinerja Pe	
Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen Monitoring,
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai sebanyak
T Childian Kinerja i egawai	mencapai 100%	4 Dokumen yaitu masing-
	sesuaingan target	masing Triwulan
	sebanyak 4 Dokumen yaitu	
Kegiatan Administrasi Umum	masing-masing Triwulan Perangkat Daerah	
Persentase pemenuhan	Persentase pemenuhan	administrasi umum
administrasi umum	administrasi umum	Perangkat Daerah selama
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah tercapai	12 Bulan dapat terlaksana
	100% sesuai target 100%	dengan baik
Sub Kegiatan Penyediaan Ko	•	
Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan	Paket Komponen instalasi listrik/penerangan	Komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang	bangunan kantor yang	bangunan kantor yang
disediakan	disediakan mencapai 100%	disediakan sebanyak dapat
	sesuai target sebanyak 1	terealisasi
Sub Kegiatan Penyediaan Per	paket alatan dan Perlengkapan Kant	or
Jumlah paket peralatan dan	Jumlah paket peralatan dan	Paket peralatan dan
perlengkapan Kantor yang	perlengkapan Kantor yang	perlengkapan Kantor
disediakan	disediakan mencapai 100%	tersedia dengan baik
	sesuai target sebanyak 1	
	paket	

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
Jumlah paket bahan Logistik yang disediakan	Jumlah paket bahan Logistik yang disediakan mencapai 100% sesuai target yaitu 1 paket	tersedia dengan baik						
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan mencapai 100% sesuai target yaitu sebanyak 1 paket	Paket barang cetakan dan penggandaan tersedia dengan baik						
Sub Kegiatan Penyediaan Bah	nan Bacaan dan Peraturan Per	undang-undangan						
Jumlah dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan mencapai 100% sesuai target yaitu 3 dokumen	Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan tersedia dengan baik						
Sub Kegiatan Penyelenggaraa		ıltasi SKPD						
Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD mencapai 100% sesuai target yaitu 12 Laporan	Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku						
Kegiatan Penyediaan Jasa Pe	nunjang Urusan Pemerintahan	Daerah						
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Perangkat Daerah tercapai sesuai target yaitu sebesar 100%	Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Perangkat Daerah terpenuhi dengan baik						
Sub Kegiatan Penyediaan Jas	sa Komunikasi, Sumber Daya <i>F</i>	Air dan Listrik						
Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan mencapai 100% sesuai target sebanyak 12 Laporan	Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik tersusun dengan baik						
Sub Kegiatan Penyediaan Jas								
Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan mencapai 100% sesuai target sebanyak 12 Laporan	Laporan penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan tersedia dengan baik						
Kegiatan Pemeliharaan Baran		san Pemerintahan Daerah						
Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dalam kondisi baik	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dalam kondisi baik mencapai 100% sesuai target 100%	Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dalam kondisi baik						

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya mencapai 100% sesuai target yaitu 15 Unit	Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dalam kondisi laik jalan								
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara mencapai 100% sesuai target yaitu 17 Unit	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dalam kondisi baik								
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ F	Rehabilitasi Gedung Kantor ata	u Bangunan Lainnya								
Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi mencapai 100% sesuai target yaitu 1 unit gedung	Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dalam kondisi baik								
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Sarana dan Pra	sarana Gedung Kantor atau								
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara mencapai 100% sesuai target yaitu 5 Unit	Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara dalam kondisi baik dan laik dijalankan.								
PROGRAM PENINGKATAN K	ERJASAMA DESA									
Persentase Desa yang melakukan Kerjasama	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama mencapai 100% sesuai target yaitu 52,23%	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama sesuai dengan target bersama								
Kegiatan Fasilitasi Kerja sama		3 5 7 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7								
Jumlah Desa yang difasilitasi	Jumlah Desa yang difasilitasi mencapai 100% sesuai target 35 Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam suatu kawasan								
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemba	ingunan Kawasan Perdesaan									
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan mencapai 100% sesuai target yaitu 3 Dokumen	Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai pedoman dalam pembinaan Kawasan Perdesaan								
PROGRAM ADMINISTRASI P	EMERINTAHAN DESA									
Persentase Desa yang Menyelenggarakan tertib Administrasi Pemerintahan Desa sesuai Standar	Persentase Desa yang Menyelenggarakan tertib Administrasi Pemerintahan Desa sesuai Standar mencapai 100% sesuai target 95%	Desa yang Menyelenggarakan tertib Administrasi Pemerintahan Desa sesuai Standar								
Kegiatan Pembinaan dan Pe Desa	engawasan Penyelenggaraan	Administrasi Pemerintahan								
Jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya	Jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya mencapai 100% sesuai target yaitu	Jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya								

Sub Kegiatan Fasilitasi Penge	olaan Keuangan Desa	
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa mencapai 100% sesuai target yaitu 2 Dokumen	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan
Sub Kegiatan Pembinaan dan Desa	Pemberdayaan BUM Desa da	n Lembaga Kerja sama antar
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasana Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasana Antar Desa mencapai 100% sesuai target 1 Dokumen	Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasana Antar Desa sesuai ketentuan
Sub Kegiatan Fasilitasi evalua		
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan mencapai 100% sesuai target 1 Dokumen	Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan sebagai acuan dalam pembinaan berikutnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		TAN, LEMBAGA ADAT DAN
Persentase LPM yang terlibat dalam pemberdayaan Masyarakat Miskin	Persentase LPM yang terlibat dalam pemberdayaan Masyarakat Miskin mencapai 100% sesuai target 50%	fungsinya
Kegiatan Pemberdayaan L Pemberdayaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat H Sama dalam Daerah Kabupate	Lembaga Adat Tingkat Dad ukum Adat yang Masyarakat I	erah Kabupaten/Kota serta
Jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang diberdayakan		Lembaga kemasyarakatan dapat diberdayakan
Sub Kegiatan Peningkatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PK Desa/Kelurahan dan Masyaral	Kapasitas Kelembagaan K, Posyandu, LPM dan Kara	
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya mencapai 100% sesuai target 3 Lembaga	Lembaga kemasyarakatan dapat diberdayakan

Sub Kegiatan Fasilitasi Tir	n Penggerak PKK dalam	Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat da	an Kesejahteraan Keluarga	
Jumlah Dokumen Hasil	Jumlah Dokumen Hasil	Fasilitasi Tim Penggerak
Fasilitasi Tim Penggerak	Fasilitasi Tim Penggerak	PKK dalam
PKK dalam	PKK dalam	Penyelenggaraan Gerakan
Penyelenggaraan Gerakan	Penyelenggaraan Gerakan	Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	dan Kesejahteraan
dan Kesejahteraan Keluarga	dan Kesejahteraan	Keluarga dapat terlaksana
	Keluarga mencapai 100%	
	sesuai target 10 Dokumen	

Sesuai dengan perincian tersebut diatas seluruh target Program, kegiatan serta Sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada TA 2023 telah tercapai sesuai dengan target yang tertuang dalam Renja 2023 maupun Renstra 2018-2023. Hal tersebut dikarenakan :

- Komitmen pemimpin di Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk melaksanakan tupoksi cukup tinggi;
- 2. SDM di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung terhadap pencapaian target tersebut.

Hal-hal yang perlu dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke depan adalah :

- 1. Komitmen pimpinan yang tinggi dan konsisten untuk selalu melaksanakan tupoksi secara optimal tetap harus dijaga;
- Meningkatkan kapasitas SDM aparatur karena tantangan dinamika dimasa datang yang sangat kompleks sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas yang lebih tinggi lagi untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai.
- 3. Tetap konsisten mengawal ketercapaian program, kegiatan serta sub kegiatan melalui evaluasi dokumen, [pengendalian kegiatan, dan SPIP;.
- 4. Meningkatkan kualitas SPIP serta sarana dan prasarana pendukung

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra

Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Sinjai

Nam	a Pera	ingkat	Daer	ah : Dir	nas Pe	emberdayaan Masyarakat dan Desa									
				,	Target Kinerja Capaian	Realisasi Target Kinerja Hasil	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berkalan				
		K	ode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Killerja Hasii Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2			+			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaita	l n Dengan Pelayanan Dasar								
2	13					Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pemberday	<u> </u>								
2	13	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Outcome : Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 %	0	100	100	100,00	100	200,00	200,00
							Outcome : Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100 %	0	100	100	100,00	100	200,00	200,00
							Outcome : Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %	0	100	100	100,00	100	200,00	200,00
2	13	01	2	01			Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	0	100	100	100,00	100	200,00	200,00
2	13	01	2	01	01	,	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	18 Dokumen	0	7	7	100,00	6	13,00	72,22
2	13	01	2	02			Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	0	100	100	100,00	100	200,00	200,00
2	13	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	0	25	25	100,00	25	50,00	200,00
2	13	01	2	02	07	Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	39 Laporan	0	13	13	100,00	13	26,00	66,67
2	13	01	2	05			Rata-rata Nilai perilaku perangkat daerah berdasarkan kinerja ASN, rata-rata capaian nilai SKP dan kinerja ASN	90 Nilai	0	100	100	100,00	90	190,00	211,11

							Target Kinerja Capaian	Realisasi Target Kinerja Hasil		ealisasi Kinerja Pro an Tahun Lalu (20		Target Program dan Kegiatan	Perkiraan Realisas Renstra Perangkat berka	Daerah s/d tahun
		Ko	ode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	(Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		1	1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	01	2	05	05 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	0	4	4	100,00	4	8,00	66,67
2	13	01	2	06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	0	100	100	100,00	100	200,00	200,00
2	13	01	2	06	01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Paket	0	1	1	100,00	1	2,00	66,67
2	13	01	2	06	O2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	0	1	1	100,00	1	2,00	66,67
2	13	01	2	06	04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan Logistik yang disediakan	3 Paket	0	1	1	100,00	1	2,00	66,67
2	13	01	2	06	05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	0	1	1	100,00	1	2,00	66,67
2	13	01	2	06	O6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen	0	3	3	100,00	3	6,00	200,00
2	13	01	2	06	09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 Laporan	0	12	12	100,00	12	24,00	66,67
2	13	01	2	07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Perangkat Daerah	100 %	0	100	100	100,00	100	200,00	200,00
2	13	01	2	07	02 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0	0	0	0,00	3	3,00	20,00
2	13	01	2	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Perangkat Daerah	100 %	0	100	100	100,00	100	200,00	200,00
2	13	01	2	08	02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	0	12	12	100,00	12	24,00	200,00
2	13	01	2	08	04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	0	12	12	100,00	12	24,00	200,00
2	13	01	2	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dalam kondisi baik	100 %	0	100	100	100,00	100	200,00	200,00

				ode				Target Kinerja Capaian	Realisasi Target Kinerja Hasil	_	alisasi Kinerja Pr an Tahun Lalu (20	•	Target Program dan Kegiatan	Perkiraan Realisas Renstra Perangkat berka	Daerah s/d tahun
		К	Code			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	(Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	0	15	15	100,00	15	30,00	200,00
2	13	01	2	09		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18 Unit	0	17	17	100,00	17	34,00	188,89
2	13			09		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	0	1	1	100,00	1	2,00	100,00
2	13	01	2	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	12 Unit	0	5	5	100,00	4	9,00	75,00
2	13	3 03	1	2		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Outcome : Persentase Desa yang melakukan Kerjasama	52,23 %	0%	52,23	52,23	100,00	52,23	104,46	200,00
2	13	03	2	01		Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	35 Desa	0	35	35	100,00	35	70,00	200,00
2	13	03	2	01	03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4 Dokumen	0	3	3	100,00	3	6,00	150,00
2	13	3 04				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Outcome : Persentase Desa yang Menyelenggarakan tertib Administrasi Pemerintahan Desa sesuai Standar	95 %	0%	95%	95%	100,00	85	85,95	90,47
2	13	04	2	01		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya	67 Desa	0	67	67	100,00	67	134,00	200,00
2	13	04	2	01	04	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	0	2	2	100,00	1	3,00	100,00
2	13	04	2	01	08	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasana Antar Desa	3 Dokumen	0	1	1	100,00	1	2,00	66,67
2	13	04	2	01	18	Sub Kegiatan Fasilitasi evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	0	1	1	100,00	1	2,00	66,67

									_					Tahun 2025
							Target Kinerja Capaian	Realisasi Target		alisasi Kinerja Pr an Tahun Lalu (20		Target Program	Perkiraan Realisas Renstra Perangkat berka	Daerah s/d tahun
	P	Code			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 13	05	j			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Out come : Persentase LPM yang terlibat dalam pemberdayaan Masyarakat Miskin	50,00 %	0,00	50,00	50,00	100,00	50,00	100,00	200,00
2 13	05	2	01		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang diberdayakan	2795 Lembaga	0	3	3	100,00	2795	2798,00	100,11
2 13	05	2	01	03	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	12 Lembaga	0	3	3	100,00	3	6,00	50,00
2 13	05	2	01	0006	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
2 13	05	2	01	0009	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	24 Dokumen	0	10	10	0,00	8	18,00	75,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, indikator kinerja kunci sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, serta Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai

No	Indikator	SPM/ Standar	IKK	Target F	Renstra P	erangkat	Daerah		lisasi aian	Proy	/eksi	Catatan Analisis
INO	mulkatol	Nasional	INN	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap total Desa/kelurahan (%)			51,25	48,75	50,00	51,25	45,00	30	35	40	
2	Cakupan Sarana dan Prasarana perkantoran pemerintahan Desa yang baik (%)			100	100	100	100	88,06	100	100	100	Terdapat Kantor Desa yang direhabilitasi
3	Rata-rata jumlah kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (Klp)			1	1	1	1	1	1	1	1	
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK			65,10	70,50	70,50	70,50	70,25	-	70,50	70,50	
5	Persentase LSM Aktif (%)			11,25	6,25	6,25	6,25	1,25	-	6,25	6,25	
6	Persentase LPM Berprestasi (%)			3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	-	3,75	3,75	
7	Persentase PKK Aktif (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Posyandu Aktif (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Cakupan Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan Masyarakat (%)			1,76	80,50	80,50	80,50	75,46	-	80,50	80,50	
10	Jumlah Desa Tertinggal			4	0	0	0	0	0	0	0	
11	Jumlah Desa Mandiri			1	25	30	37	33	42	45	48	
12	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal (%)			94,03	0	0	0	0	0	0	0	
13	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (%)			1,49	60,00	66,67	25,00	47,06	27,27	7,14	6,67	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai Peraturan Bupati Sinjai Nomor 19 Tahun 2023 adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu :

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
- 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

Pada saat ini ada beberapa hal yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai tingkat kinerja pelayanan, yaitu :

- Rendahnya Kapasitas SDM (Pengetahuan, sikap dan Keterampilan) aparatur pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat Desa
- 2. Kapasitas Lembaga Pemerintah Desa
- 3. Rendahnya kapasitas SDM (Pengetahuan, sikap dan keterampilan) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
- 4. Belum optimalya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masyarakat
- 5. Keterbatasan sumber daya manusia Kader PKK dalam penerapan 10 Program pokok PKK
- 6. Belum optimalnya pelaksanaan 10 program pokokk PKK, baik di kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- 7. Terbatasnya data dan informasi tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Rumah Tangga Miskin dan Keluarga Miskin
- 8. Rendahnya kemampuan SDM LPM yang ada di Desa/Kelurahan
- 9. Belum optimalnya pendalaman tugas kelembagaan kemasyarakatan yanga da di Desa/Kelurahan
- 10. Belum Akuratnya data kelembagaan masyarakat di Desa/Kelurahan
- 11. Rendahnya kapasitas SDM Pengelola Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa
- 12. Rendahnya kapasitas SDM (Pengetahuan, sikap dan Keterampilan) pengurus Lembaga Posyantek dan Wartek
- 13. Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan posyantek
- Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :
- 1. Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Desa;

- 2. Meningkatkan kualitas SDM Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
- Pengelolaan Data dan Informasi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Rumah Tangga Miskin dan Keluarga Miskin
- 4. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa, Lembaga Posyantek dan Wartek.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah banyak hal yang menjadi tantangan namun adapula yang menjadi peluang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yaitu :

Tantangan:

- Masih rendahnya kualitas aparatur Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundangundangan;
- Rendahnya kualitas SDM di Pedesaan;

Peluang:

- Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
- Potensi Masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
 Adanya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Dalam pembangunan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPD Kabupaten Sinjai 2024-2026. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaslan RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD 2025 dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Sinjai

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lembar 1 dari 12

N	Nama SKPD : Dinas Pem	berdayaan Mas	yarakat dan Desa							Lembar 1	dari 12
		Rai	ncangan Awal RKPD				Hasil	Analisis Kebutuhan			0-4-4
NO.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
. /	PROGRAM PENUN KABUPATEN/KOTA				2.853.475.840	PROGRAM PENUN KABUPATEN/KOTA			N DAERAH	3,631,008,879	
	Perencanaan, Pengan	ggaran, dan E	valuasi Kinerja Perai	ngkat Daerah	15.030.300	Perencanaan, Peng Daerah	anggaran, dai	n Evaluasi Kinerja	a Perangkat	30,047,600	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6 Dokumen	15.030.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	7 Dokumen	30.000.000	Penyusu nan Renstra OPD karena Bupati terpilih
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.451.397.730	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.815.196.840	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan dalam 1 tahun	25 Orang/Bulan	2.414.994.230	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan dalam 1 tahun	29 Orang	2.758.557.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	15 Laporan	36.403.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	13 Laporan	56.639.840	
	Administrasi Kepegav	vaian Perangka	at Daerah		5.500.000	Administrasi Kepega	waian Perangk	at Daerah	•	85.600.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Dokumen monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	5.500.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Dokumen monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	15.600.000	
	Administrasi Umum P	erangkat Daer			178.429.980	Administrasi Umum	Perangkat Daer			536,202,540	
	Penyediaan Komponen Instalasi	Kab. Sinjai, Sinjai Utara,	Jumlah Paket Komponen	1 Paket	2.800.000	Penyediaan Komponen Instalasi	Kab. Sinjai, Sinjai Utara,	Jumlah Paket Komponen	1 Paket	2.800.000	

		Rar	ncangan Awal RKPD				Hasil	Analisis Kebutuhan			•
NO.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alehanuae	Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang disediakan			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alehanuae	Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang disediakan			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	8.442.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	8.442.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	1 Paket	12.655.280	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	1 Paket	29.261.360	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	10.871.200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	5.110.800	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	3 Dokumen	4.680.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	3 Dokumen	4.680.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	138.961.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	397,274,400	
	Pengadaan Barang M		unjang Urusan Pem		55.150.000	Pengadaan Barang Daerah				31,000,000	
	Pengadaan Peralatand an Mesin Lainnya	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	55.150.000	Pengadaan Peralatand an Mesin Lainnya	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	31,000,000	
	Penyediaan Jasa Pen			ah	79.470.480	Penyediaan Jasa Per	nunjang Urusar	Pemerintahan Daer	ah	90,467,280	

		Rar	ncangan Awal RKPD				Hasil	Analisis Kebutuhan			
NO.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	46.691.280	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	73,667,280	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Lapor9an Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	32.779.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	16,800,000	
	Pemeliharaan Baranç Daerah	g Milik Daerah	Penunjang Urusar	n Pemerintahan	68.497.350	Pemeliharaan Barang Daerah	g Milik Daerah I	Penunjang Urusan P	emerintahan	90,402,600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	34.917.350	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	41,606,900	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26 Unit	18.700.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	31 Unit	22,270,000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Gedung	16,765,700	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/	8 Unit	4.880.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/	16 Unit	9,760,000	

		Raı	ncangan Awal RKPD				Hasil	Analisis Kebutuhan			Catatan
NO.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			direhabilitasi					direhabilitasi			
	PROGRAM PENINGK	ATAN KERJAS	AMA DESA		20.000.000	PROGRAM PENINGK		SAMA DESA		65,000,000	
	Fasilitasi Kerja sama	antar Desa			20.000.000	Fasilitasi Kerja sama	antar Desa			65,000,000	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	40,000,000	
	PROGRAM ADMINIST	RASI PEMERIN	NTAHAN DESA		1.480.420.000	PROGRAM ADMINIS	TRASI PEMERI	NTAHAN DESA	•	2.082.323.630	
	Pembinaan dan Pemerintahan Desa	Pengawasan	Penyelenggaraan	Administrasi	1.480.420.000	Pembinaan dan Pemerintahan Desa	Pengawasan	Penyelenggaraan	Administrasi	2.082.323.630	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1.400.420.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2 Dokumen	1.374.107.168	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	1 Dokumen	20.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	67 Dokumen	30,000,000	

							Hasil	Analisis Kebutuhan			
NO.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Sinjai, Sinjai Barat, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Selatan, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Sinjai Timur, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Sinjai Tengah, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Sinjai Tengah, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Bulupoddo, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Bulupoddo, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Pulau Sembilan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	60.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Sinjai, Sinjai Barat, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Sinjai Selatan, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Sinjai Timur, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Sinjai Tengah, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Sinjai Tengah, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Bulupoddo, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Bulupoddo, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Sinjai Borong, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Sinjai Borong, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	67 Dokumen	129,895,200	

		Rar	ncangan Awal RKPD				Hasil	Analisis Kebutuhan			0.1.1
NO.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PEMBE			ASYARAKATAN,	560.000.000	PROGRAM PEMBE			ARAKATAN,	1,035,000,000	
	Pemberdayaan Lemb Pemberdayaan Des Kabupaten/Kota serta Masyarakat Pelakun Kabupaten/Kota	baga Kemasya sa dan Lei a Pemberdaya ya Hukum A	rakatan yang Berg mbaga Adat Ti an Masyarakat Huk Adat yang Sama	ngkat Daerah kum Adat yang dalam Daerah	560.000.000	Pemberdayaan Lemk Pemberdayaan Des Kabupaten/Kota sert Masyarakat Pelakun Kabupaten/Kota	paga Kemasyar sa dan Lem a Pemberdayaa aya Hukum Ad	akatan yang Berger nbaga Adat Ting an Masyarakat Huku dat yang Sama da	kat Daerah m Adat yang alam Daerah	1,035,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Lembaga	150.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	80 Lembaga	30,000,000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaat- an Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaat- an Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	50,000,000	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	400.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Dokumen	850,000,000	

Pada tabel diatas tidak terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan Hasil Analisis kebutuhan. Rancangan awal RKPD setelah dianalisis, maka Hasil Analisis Kebutuhan tidak mengalami perubahan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Pada tabel dibawah ini terdapat beberapa usulan pemangku kepentingan hasil musrenbang kecamatan yang nantinya akan dimasukkan dalam program kerja Perangkat Daerah tahun depan.

Tabel 4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Sinjai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa				Sesuai dengan rancangan awal Renja
	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur; Desa Barambang Kecamatan Sinjai Borong; Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat	
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten		,	Sesuai dengan rancangan awal Renja

Kegiatan Pemberdayaa Lembaga Kemasyaraka yang Berger Bidang Pemberdayaa Desa dan Ler	tan ak di in mbaga			
Daerah Kabupaten/Koserta Pemberdayaa Masyarakat H Adat Masyarakat Pelakunya H Adat yang	ln Hukum yang Hukum Sama			
Kabupaten/Ko	Daerah ota giatan Kabupaten	Jumlah Lembaga	Desa Kampala	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyaraka Desa/Kelurah (RT, RW, Posyandu, Karang Ta Lembaga Desa/Kelurah	tan an PKK, LPM, uruna),	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya (Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa (PKK,LPM, Posyandu)	Kecamatan Sinjai Timur; Desa Barambang Kecamatan Sinjai Borong;Desa	

Dari hasil rekapitulasi dari para pemangku kepentingan / hasil musrenbang kecamatan ada beberapa kegiatan yang selaras dengan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan tetapi kegiatan akan dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia dan mengundang perwakilan Lembaga Kemasyarakatan dan Lokasi Pelaksanaan di Kabupaten.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan".

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan pada RKP 2025, yaitu:

- 1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
- 2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastukrut konektivitas;
- 3. Pengembangan transisi energi;
- 4. Percepatan Infrastuktur IKN;
- 5. Reformasi pengelolaan sampah;
- 6. Ekonomi inklusif dan Berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*). Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dalam membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2025 adalah 1). Meningkatkan Status kemajuan dan kemandirian Desa.

Untuk mencapai tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai adalah 1). Meningkatnya Status kemajuan dan kemandirian Desa; 2). Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa.

TABEL 5
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula	Target Kinerja Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kemajuan dan kemandirian		Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Sinjai		0,7206
	Desa	Meningkatnya Status Kemajuan dan kemandirian Desa	Persentase Desa Tertinggal yang menjadi Desa Berkembang		0
			Persentase Desa Berkembang yang menjadi Desa Maju		33
			Persentase Desa Maju yang menjadi Desa Mandiri		3
			Persentase Desa Mandiri		44,78
		Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan LPM		1

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan program terkait adalah :

- 1. Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- b. Uraian program dan kegiatan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2025 mencakup 4 (Empat) program yaitu program rutin/pendukung dan program utama dan 10 (Sepuluh) Kegiatan serta 24 (dua puluh empat) Sub kegiatan.

Program Utama

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Peningkatan keberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan dengan kegiatan :

- Kegiatan Fasilitasi kerja sama antar Desa
 Kegiatan Fasilitasi kerja sama antar Desa terdiri dari sub kegiatan :
 - Sub kegiatan Fasilitasi pembangunan kawasan Perdesaan

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini bertujuan untuk penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :

- Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolan keuangan Desa
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini mempunyai tujuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kegiatan :

- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat..
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Keluruahan (RT, RW PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Program Pendukung

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mempunyai tujuan dalam mendukung/menunjang program teknis, dengan kegiatan :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:

- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan :

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lsitrik.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dari program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada dasarnya menyebar pada 9 kecamatan, adapula Sub kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten dengan mengundang Kelompok Masyarakat atau kelompok sasaran kegiatan. Ada beberapa kegiatan yang menjadikan kelompok masyarakat/lembaga masyarakat sebagai sasaran seperti Tim Penggerak PKK, serta Pemerintah Desa.

Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program di bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan, maka disusunlah rencana program kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2025 dimana program tersebut diwujudkan dalam sub kegiatan belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sinjai, dengan Jumlah pagu anggaran sebesar *Rp.3.866.862.613,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah)*.

Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan dari masing-masing program dapat dilihat pada tabel berikut :

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SINJAI TAHUN 2025

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	ERJA DAN KERAI	NGKA PENDANAAN	ı		V51 01100V	PRAKIRA	AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET				PRIO	RITAS	KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KEGIATAN		OPD	TAHUN 2023	2024	2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN MA	ASYARAKAT DAN DESA		•			3.866.862.613,00						•	6.677.413.526,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.866.862.613,00							6.677.413.526,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						3.866.862.613,00							6.677.413.526,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen	3.165.558.313,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen	4.234.603.826,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD tepat waktu	100 Persen			100 Persen	15.328.800,00				05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	100 Persen	16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perend	canaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen			7 Dokumen	15.328.800,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	6 Dokumen	16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	IERJA DAN KERA	NGKA PENDANAAI	N		KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO	KODE	KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET				PRIC	RITAS	SASARAN			PENANGGUNG JAWAB
		KEGIATAN	in the sum of the sum	OPD	TAHUN 2023	2024	2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 Persen			100 Persen	2.705.111.385,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	100 Persen	3.786.271.766,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	gan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan			25 Orang/bulan	2.668.191.485,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	25 Orang/bulan	3.771.271.766,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan I	Laporan Keuangan Bulanan/ Triw	rulanan/ Semes	teran SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	39 Laporan			15 Laporan	36.919.900,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	13 Laporan	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

		URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	IERJA DAN KERA	NGKA PENDANAA	N		KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO	KODE	KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET				PRIC	RITAS	SASARAN			PENANGGUNG JAWAB
		KEGIATAN	1.20	OPD	TAHUN 2023	2024	2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai perilaku perangkat daerah berdasarkan kinerja ASN, rata-rata capaian nilai SKP dan kinerja ASN	90 Nilai			90 Nilai	5.400.000,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	90 Nilai	20.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Per	l nilaian Kinerja Pegawai													
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen			4 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	4 Dokumen	5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementa	asi Peraturan Perundang-Undang	gan												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang			0 Orang	0,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	2 Orang	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	ERJA DAN KERA	NGKA PENDANAAN	ı				AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
O KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET	DACILINDIKATIE (D)	LOKACI	CUMPED DAMA	PRIC	RITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	DAGU INDIKATIF (D.,)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	REGIATAN		OPD	TAHUN 2023	2024	2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen			100 Persen	274.510.300,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		100 Persen	225.631.580,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instal	asi				•			•		•				
	Listrik/Penerangan Bangunan	Kantor		_											
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	2.795.600,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		1 Paket	2.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pe	erlengkapan Kantor													
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	4.197.300,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		1 Paket	8.462.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	ERJA DAN KERAI	NGKA PENDANAAN	N		V51 01100V		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET				PRIO	RITAS	KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAE
	KEGIATAN	REGIATAN	OPD	TAHUN 2023	2024	2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	11.645.200,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		1 Paket	12.655.280,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	dan Penggandaan													
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	6.871.200,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		1 Paket	12.871.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan da	an Peraturan Perundang-undang	an	1		•			1	1			1	1	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen			3 Dokumen	4.680.000,00	Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		3 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	ERJA DAN KERAI	NGKA PENDANAAN	ı		//=! !-		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	DED
NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIC	RITAS DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan			12 Laporan	244.321.000,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		12 Laporan	183.842.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan barang milik perangkat daerah	100 Persen			100 Persen	45.945.500,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		100 Persen	55.150.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Me	I sin Lainnya	1				1			1				1	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit			6 Unit	45.945.500,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		5 Unit	55.150.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100 Persen			100 Persen	73.661.928,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	100 Persen	97.470.480,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	ERJA DAN KERAI	NGKA PENDANAAI	N				AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET		1.01/1.01	0,1110,500,500,100	PRIO	RITAS	KELOMPOK SASARAN	T.DOFT		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAI
	KEGIATAN		OPD	TAHUN 2023	2024	2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi	, Sumber Daya Air dan Listrik													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	41.141.928,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		12 Laporan	64.691.280,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan I	Umum Kantor		•	,	•			•	•					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	32.520.000,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	12 Laporan	32.779.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD perangkat daerah dalam kondisi baik	100 Persen			100 Persen	45.600.400,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		100 Persen	33.580.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	ERJA DAN KERAI	NGKA PENDANAAI	N		VEL CARDOV		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET				PRIC	ORITAS	KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAE
	KEGIATAN	REGIATAN	OPD	TAHUN 2023	2024	2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit			15 Unit	26.190.400,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		15 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan I	Mesin Lainnya													
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit			26 Unit	12.130.000,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		18 Unit	18.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Ge	dung Kantor dan Bangunan Lain	nnya					I	1		1			1	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	2.400.000,00	Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		2 Unit	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	ERJA DAN KERAN	IGKA PENDANAAN	1				AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
O KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET	DACILINDIKATIE (D.)	LOVACI	CUMPED DANA	PRIO	RITAS	KELOMPOK SASARAN	TARCET	DACILINDIKATIE (D.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	REGIATAN		OPD	TAHUN 2023	2024	2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit			8 Unit	4.880.000,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	4 Unit	4.880.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama	52,23 Persen			52,23 Persen	21.574.600,00						52,23 Persen	40.000.000,00	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi	35 Desa			35 Desa	21.574.600,00				05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Kepala Desa, OPD Terkait dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	35 Desa	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar De	esa dalam Kabupaten/Kota	•	1						•	'		1		,
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Kepala Desa, OPD Terkait dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	4 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	ERJA DAN KERAI	NGKA PENDANAAN	ı				AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET				PRIC	RITAS	KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KEGIATAN		OPD	TAHUN 2023	2024	2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Kepala Desa, OPD Terkait dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	4 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawa	san Perdesaan										•			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4 Dokumen			4 Dokumen	21.574.600,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Terkait dan Badan Kerjasama Antar	4 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyelenggarakan tertib administrasi pemerintahan Desa sesuai standar	90 Persen			90 Persen	132.059.100,00						90 Persen	1.707.809.700,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan Adminsitrasinya	67 Desa			67 Desa	132.059.100,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	67 Desa	1.707.809.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	ERJA DAN KERA	NGKA PENDANAAI	N				AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET	T			PRIC	DRITAS	KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAE
	KEGIATAN		OPD	TAHUN 2023	2024	2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	7 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	2 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuan	gan Desa													
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen			1 Dokumen	39.262.200,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	1 Dokumen	1.412.420.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kap	asitas Aparatur Pemerintah Desa	a	1		1	•			•				•	
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	268 Orang			0 Orang	0,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya	-	67 Orang	68.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES.

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	ERJA DAN KERAI	NGKA PENDANAAI	N				AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD	TARGET RENJA	TARGET				PRIC	RITAS	KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAI
	KEGIATAN	NEGIATAN	OPD	TAHUN 2023	2024	2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen			1 Dokumen	22.587.000,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		1 Dokumen	35.584.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset D	esa													
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	201 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		67 Dokumen	7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kap	asitas Anggota BPD	1	1	•	•		ı	1	•	1		1		
		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	402 Orang			0 Orang	0,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya	-	201 Orang	85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	ERJA DAN KERAI	NGKA PENDANAAN	١		KEI OMDOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIC	DRITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	DACILINDIKATIF (Da)	PENANGGUNG JAWAB
		REGIATAN		OPD	TAHON 2023	2024	2025	PAGU INDIKATIF (KP)	LUNASI	SUNDER DANA	NASIONAL	DAERAH		IARGEI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	3 Laporan			0 Laporan	0,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	1 Laporan	7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
-	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkemban	gan Desa serta Lomba Desa dar	n Kelurahan	1						,			1		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen			1 Dokumen	70.209.900,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	1 Dokumen	86.804.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LPM yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat miskin	50 Persen			50 Persen	547.670.600,00						50 Persen	695.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan	2795 Lemba ga			2795 Lembaga	547.670.600,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	2795 Lemba ga	695.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	ERJA DAN KERAI	NGKA PENDANAAI	N				AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET				PRIC	RITAS	KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAE
	KEGIATAN	N.Z.Surtivit	OPD	TAHUN 2023	2024	2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen			0 Dokumen		Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES
2.13.05.2.01.0002	Pasilitasi Penataan, Pemberd	ayaan dan Pendayagunaan Kele Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	aga Kemasyarai	Katan Desa/Kelurana	1 Dokumen	19.263.600,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	anan dan Mas	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelem	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	tan Desa/Kelura	han (RT, RW, P	KK, Posyandu, LPN	1, dan Karang T	aruna), Lembaga Adat Desa/ 150.000.000,00		DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN	t -	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	·	5 Lembaga	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	ERJA DAN KERAI	NGKA PENDANAAI	N				AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET				PRIO	RITAS	KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWA
	KEGIATAN		OPD	TAHUN 2023	2024	2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		1 Dokumen	35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa da	ılam Pemanfaatan Teknologi Tep	oat Guna	•						•			•		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan			1 Laporan	0,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		1 Laporan	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong	Royong Masyarakat					1			1				1	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3 Laporan			0 Laporan	0,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		1 Laporan	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	IERJA DAN KERAN	NGKA PENDANAAN	N		KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH
NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	_	RITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		REGIATAN		OPD	TATION 2023	2024	2025	PAGO INDIKATIF (KP)	LONASI	SOMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGO INDIKATIF (KP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	24 Dokumen			8 Dokumen	378.407.000,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	8 Dokumen	420.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			JUMLAH					3.866.862.613,00							6.677.413.526,00	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan program prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Renstra selanjutnya dijabarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja yang dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sinjai dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Capaian kinerja yang direncanakan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah 1). Meningkatnya Status kemajuan dan kemandirian Desa; 2). Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

Program / kegiatan / Subkegiatan	Pagu Indikatif
1	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.165.558.313
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.328.800
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.328.800
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.705.111.385
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.668.191.485
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36.919.900
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.400.000
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.400.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.510.300
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.795.600

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Peningkatan Kaasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	19.263.600 150.000.000 378.407.000 3.866.862.613
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Peningkatan Kaasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	19.263.600 150.000.000
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Peningkatan Kaasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	547.670.600
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
	547.670.600
Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	70.209.900
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	22.587.000
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	32.262.200
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	132.059.100
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	132.059.100
Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	21.574.600
Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa	21.574.600
Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	21.574.600
Lainnya Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	4.880.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	2.400.000
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.130.000
Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	26.190.400
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	32.520.000 45.600.400
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.141.928
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.661.928
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.945.500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.945.500
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244.321.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	4.680.000
Our Regional Fellyculation Datality Octaball Vall Fellygalivation	6.871.200
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.645.200
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.197.300

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh perangkat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun ke depan yaitu tahun 2025 dan berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam hal pelaknsanaan kegiatan ini diharapkan program dan kegiatan sesuai dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, untuk itu sebelum memulai kegiatan diharapkan membuat kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) agar pelaksanaan kegiatan dapat memenuhi output yang diharapkan.

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Penjabaran dimaksud akan dikoordinasikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sinjai. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam Pengambilan Keputusan dan penyusunan Rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

MDrs. MUHADI SAMAD, M. Si Pangkat Pembina Utama Muda